

BAGIAN 3

POLICE INDONESIA
THANK YOU

POLDA NTB NAIK TIPE, PEMILUKADA DAMAI DAN BAHAGIA

Belum sepenuhnya selesai ‘beres-beres’ di Maluku Utara, sejatinya Achmat Juri bisa menikmati hasil kerjanya. Kantor Mapolda Maluku Utara telah rampung dengan tampilan sangat baru, ruang kerja Wakapolda Maluku Utara, sudah beres, ruangan-ruangan di Mapolda Maluku Utara telah tertata rapi dan bersih, kantor-kantor satuan seperti Sabhara sudah pindah menjadi lebih layak (tidak lagi mengontrak di gang sempit).

Begitu pula dengan SPN Maluku Utara sudah lahir dan siap menerima siswa angkatan pertama, tanah untuk pembangunan SPN Maluku Utara seluas 12 hektar di Tidore juga sudah siap dan pembangunannya berjalan. Sisa satu pekerjaan yang belum selesai yakni ruangan kerja



Hanya 9 bulan menjadi Kapolda Maluku Utara, Achmat Juri kembali pindah tugas menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat menggantikan Brigjen. Pol. Drs. Firhy, M. Si

Kapolda Maluku Utara yang dikerjakan terakhir setelah seluruh Mapolda Maluku Utara rampung. Achmat Juri bisa bernafas lega, semua proses pembangunan dan penataan itu berjalan lancar. Ia tinggal menunggu ruang kerjanya jadi. Setelah itu terbayangkan ruang kerja yang baru. Ia bisa bekerja dengan suasana yang lebih nyaman.

Namun, rupanya nasib berkata lain. Suasana bekerja dari kantor yang lebih nyaman di Maluku Utara itu hanya ada dalam khayalan belaka. Sementara ruangnya tengah dibereskan tersebut, ia malah menerima surat mutasi. Praktis semua mimpi duduk di ruangan nyaman Kapolda Maluku Utara itu, terhenti sampai saat ia menerima Telegram Rahasia Kapolri bernomor: ST/964/IV/KEP/2018, tanggal 8 April 2018.

Dengan TR itu, Achmat Juri harus meninggalkan Maluku Utara pada waktu yang tidak lama setelah ia menerima surat tugas baru. Seperti kebiasaannya sehari-hari dalam memimpin, selalu melakukan hal lebih baik setiap harinya, maka tidak salah, takdir baik itu pun

senantiasa menghampirinya. Berhenti menjadi Kapolda Maluku Utara, Achmat Juri diberi amanah baru sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat, bertipe B dan selanjutnya memimpin Polda NTB bertipe A. Ini sama halnya dengan ia tiga kali berturut-turut memimpin Polda. Tentu hal tersebut menjadikan ia bukan Jenderal biasa di mata pimpinannya.

Pada tanggal 19 April 2018 usai dilantik Kapolri Jenderal Tito Karnavian, ia pun bersiap untuk memulai langkah selanjutnya, membangun di Bumi Gora saat resmi dilantik sebagai Kapolda NTB. Menggantikan Brigjen Pol Drs. Firli, M.Si., Kapolda NTB sebelumnya, Brigjen Pol



Achmat Juri dan istri tiba pertama kali di Bandara Internasional Lombok, untuk menunaikan tugas berikutnya sebagai Kapolda NTB



Rangkaian penyambutan kedatangan Achmat Juri sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat, di Bandara Internasional Lombok

Drs. Achmat Juri, M.Hum., datang dengan merancang berbagai kebijakan kamtibmas di Nusa Tenggara Barat.

Kebijakan lama yang baik akan diteruskan dan kebijakan lainnya akan dimaksimalkan juga kebijakan-kebijakan sebagai inovasi dalam kepemimpinannya di provinsi yang memiliki dua pulau ini, Lombok dan Sumbawa. Komando kepemimpinan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) resmi dan sepenuhnya kini berada di bawah

pimpinan Brigjen Pol Drs. Achmat Juri, M.Hum, sesaat usai ia menerima Pataka Polda NTB dari Brigjen Pol Drs. Firly, M.Si., (Kapolda sebelumnya) dalam rangkaian upacara 'Farewell an Wellcome Parade' di Lapangan Gajah Mada Polda NTB, pada tanggal 20 April 2018.

Membawa kebijakan besar Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya, berupa peningkatan kinerja, perbaikan kultur dan manajemen media, Achmat Juri menetapkan kebijakan selama kepemimpinannya di NTB. Pada langkah pertamanya menginjakkan kaki ke NTB sebagai Kapolda, ia sesungguhnya telah banyak menyiapkan ide dan gagasan. Yang utama dilakukannya memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Silaturahmi yang memperpanjang usia adalah yang pertama dilakukannya.

Terhitung di bulan Mei, pada bulan pertama ia memimpin, ia telah melakukan silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya. Juga membangun komunikasi dengan berbagai instansi khususnya yang terkait dalam hal pemeliharaan kamtibmas di Nusa Tenggara Barat. Silaturahmi ini terus berlangsung selama masa kepemimpinannya. Beberapa agenda besar yang digelar di Nusa Tenggara Barat menjadi fokus dari rencana-rencananya membangun kamtibmas yang sehat dan terukur. Beberapa di antaranya adalah menghadapi tahun politik yakni, Pemilu serentak tahun 2018.



Risna resmi menjadi ibu asuh Polwan Polda NTB setelah sertijab ibu asuh Polwan yang merupakan rangkaian dari sertijab Kapolda NTB

Di NTB ada empat Pemilukada serentak yang berlangsung tanggal 27 Juni 2017, yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Bima. Pemilukada yang diselenggarakan yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

Agenda lainnya yang tidak kalah penting adalah berjuang mengggolkan kenaikan tipe Polda NTB dari tipe B ke tipe A. Ini menjadi sangat penting untuk segera diwujudkannya mengingat tantangan kamtibmas ke depan di provinsi yang menjadi salah satu andalan pariwisata tanah air ini akan semakin kompleks.

Achmat Juri
JEJAK LANGKAH
DI PENGGALAN WAKTU



Kerja cepat dan dorongan yang kuat terus dilakukan oleh Achmat Juri dalam memimpin kenaikan tipe Polda NTB dari B menjadi A

Dan pada masa awalnya bertugas di NTB, pengamanan kegiatan lebaran turut menjadi fokus tugasnya. Selain itu, ia kemudian menyusun banyak rencana lain selama bertugas di Bumi Gora ini. Konsentrasinya mulai terarah. Perjuangan dimulai. Menaikkan status tipe Polda NTB dengan melakukan perjuangan bersama seluruh jajaran Polda NTB mendorong lebih kuat lagi mewujudkan kenaikan tipe Polda dari tipe B menuju tipe A.

Kala itu pengajuan untuk kenaikan tipe Polda sudah dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Masih banyak kriteria dan kategori yang harus dipenuhi untuk bisa menaikkan tipe Polda dari B menjadi A. Setidaknya ada 48 kriteria yang harus dipenuhi terkait dengan kinerja Polda

NTB seperti, di antaranya indeks tata kelola kepolisian, pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintahan harus jelas dan bagaimana menyiapkan organisasi yang sesuai dengan indeks reformasi birokrasi polri.

Ini tentu membutuhkan kerja keras dan semangat lebih untuk bisa memenuhinya. Selaku Kapolda NTB, Achmat Juri yang kerap meninggalkan jejak-jejak ‘warisan’ di bekas tempat-tempat tugasnya ini, menganggap perjuangan untuk kenaikan tipe ini dorongannya harus lebih kuat lagi. Proses untuk menuju kenaikan tipe ini memang bukan masalah gampang, melainkan membutuhkan kerja ekstra dalam memenuhi syarat-syaratnya, setidaknya standar 48 indikator pada 9 bidang harus terpenuhi seluruhnya.

Proses panjang memang harus dilalui oleh Polda NTB dalam mewujudkan kenaikan tipe ini. Ia pun memimpin kerja cepat dan tepat dalam membenahi dan memenuhi syarat-syarat dari berbagai kategori yang dianggap masih



Studi kelayakan dan evaluasi usul peningkatan tipe Polda Nusa Tenggara Barat, dilakukan oleh KemenPAN RB RI

Achmat Juri
JEJAK LANGKAH
DI PENGGALAN WAKTU



Achmat Juri fokus membawa Polda NTB meningkat kinerja dan kualitas pelayanan publik demi menaikkan tipologi Polda dari tipe B ke tipe A

kurang tersebut. 48 kategori yang dinilai itu ia inventarisir satu persatu dan menemukan kategori mana yang membutuhkan perhatian khusus dan harus segera dikebut.

Mulai dari situasi kesatuan, komposisi personal, sarana prasarana dan lain-lainnya. ini semua harus terpenuhi agar kenaikan tipologi ini dapat terlaksana. Polda NTB dinilai sudah waktunya menjadi tipe A dikarenakan beberapa pertimbangan yang menjadi syarat kenaikan tipe ini, seperti, pertimbangan kondisi geografis wilayah, perbatasan dengan negara, dan sejumlah potensi konflik di daerah.

Pertimbangan ini berbanding lurus dengan adanya peningkatan beban kerja, penguatan kapasitas organisasi, peningkatan dukungan sumber daya dan personel. Untuk Nusa Tenggara Barat, potensi pariwisata menjadi salah satu pertimbangan khusus dalam usulan kenaikan tipe ini,

di mana NTB menjadi salah satu gerbang destinasi wisata utama di Indonesia, dimana potensi wisata NTB 10 tahun ke depan diperkirakan akan melaju dengan pesat.

Salah satu yang paling penting diperhatikan oleh Polda NTB kala itu yakni perbaikan tata kelola dan penerapan transparansi serta akuntabilitas. Di sinilah wujud kerja keras yang diperlihatkan Achmat Juri beserta jajaran dalam mengejar kenaikan tipologi tersebut. Karena bagaimana pun, penerapan transparansi dan akuntabilitas akan dinilai sebagai capaian keberhasilan unit kerja dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

Dengan sangat serius Achmat Juri membawa Polda



Foto (atas dan bawah): Mendampingi kunjungan Men-PAN-RB dalam proses studi kelayakan dan evaluasi untuk kenaikan tipe Polda dari tipe B menjadi tipe A



Pameran informasi pelayanan publik Polda NTB, dalam rangka studi kelayakan kenaikan tipologi Polda NTB dari tipe B menjadi tipe A

NTB untuk fokus dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publiknya. Karena ia tahu bahwa tanpa adanya keseriusan dan komitmen nyata dari seluruh jajaran maka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan akan tidak tercapai secara optimal.

Akhirnya semua indikator penilaian untuk kenaikan tipologi ini terpenuhi dan akhirnya merujuk pada hasil serangkaian studi kelayakan, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara ditetapkan tipologinya naik dari tipe B menjadi A, berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/674-677/V/2018 tanggal 21 Mei 2018. Kenaikan tipe ini diperoleh kurang dari satu bulan setelah ia memimpin Polda NTB.

Peningkatan tipologi Polda NTB ini, tentu saja

disambut gembira karena dampaknya akan sangat bisa dirasakan oleh masyarakat NTB khususnya berkaitan dengan sistem pelayanan Kepolisian dimana seluruh pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing satuan tugas maupun satuan kerja di lingkup kerja Polda NTB, akhirnya harus berbasis teknologi informasi.

Ini dampak baik yang bagi kemudahan pelayanan untuk masyarakat. Selain soal pelayanan yang semakin memudahkan dan mendekatkan masyarakat, peningkatan tipologi ini juga berdampak pada kebutuhan personel Kepolisian. Berdasarkan standarisasi polda tipe A, maka mau tidak mau 15.000 personel Kepolisian harus dipenuhi di Polda NTB tipe A ini.



*Kerja keras Achmat Juri sebagai
Kapolda Nusa Tenggara Barat, bersama seluruh jajarannya
membuahkan kesuksesan dengan ditetapkannya Polda NTB
naik tipe dari B ke tipe A di tahun 2018*

Ikhtiar sungguh-sungguh dalam memperjuangkan kenaikan tipologi Polda NTB menjadi tipe A akhirnya berbuah manis. Bersama tiga polda lainnya, Polda Jambi, Polda Kalimantan Selatan dan Polda Kalimantan Tengah, akhirnya Polda NTB naik tipe menjadi tipe A di tahun 2018.

28 Mei 2018, menjadi momentum istimewa bagi Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat NTB), karena di hari itulah Wakapolri Komjen Pol.Drs. Syafruddin, M.Si.m, memimpin upacara pengukuhan peningkatan tipologi Polda NTB dari tipe B menjadi Tipe A dilaksanakan di Lapangan Gajah Mada Polda NTB. Kenaikan status ini bagi Achmat Juri merupakan amanah lebih yang harus dijalaninya. Bagaimana tidak, dengan status tipe A yang kini disandang Polda NTB, membuat ia dan jajarannya harus bekerja lebih keras lagi dalam



Wakapolri, Komjen. Pol. Drs. Syafruddin, memimpin upacara kenaikan tipe Polda Nusa Tenggara Barat, dari tipe B ke tipe A, di Lapangan Gajah Mada Polda NTB



(Kiri)Wakapolri, Komjen. Pol. Drs. Syafruddin, menyerahkan Pataka Polda NTB yang telah naik tipe dari tipe B ke tipe A. (Kanan) penandatanganan kenaikan tipologi Polda NTB oleh Wakapolri didampingi Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majidi dan Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Achmat Juri

meningkatkan pelayanan publik dan stabilitas keamanan menjadi lebih baik.

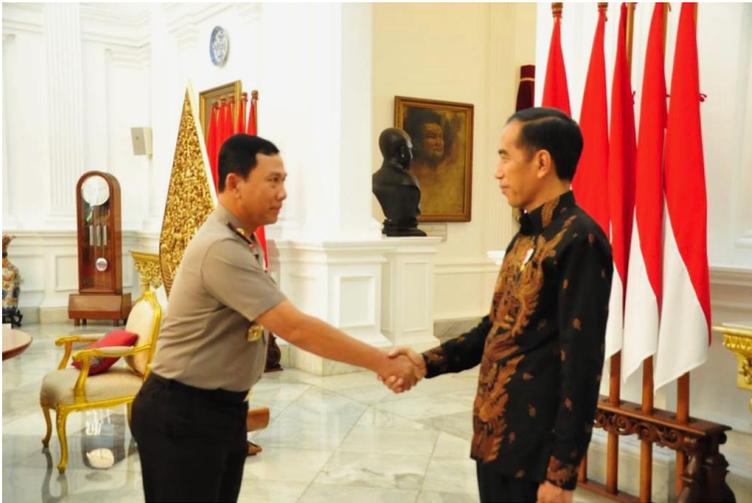
Apalagi momentum peningkatan tipe polda ini bertepatan dengan Bulan Ramadhan, dimana Polisi NTB harus dapat memberi kedamaian dan ketenteraman bagi masyarakat NTB. Harus bisa menghadirkan pelayanan publik yang prima. Termasuk pula dengan penambahan personel untuk polda tipe A yang otomatis dilakukan ini, keamanan masyarakat harus mampu dijamin Polda NTB dan jajarannya. Ini bukan tugas mudah melainkan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Penegakan hukum juga harus dilakukan dengan lebih professional lagi, terutama tentang penanganan kamtibmas yang optimal juga menangani potensi konflik sosial yang menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Achmat Juri
JEJAK LANGKAH
DI PENGGALAN WAKTU

Setelah prosesi pengukuhan kenaikan tipe Polda NTB, 43 hari kemudian Brigjen. Pol. Achmat Juri, naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi. Ia dilantik sebagai Irjen. Pol, pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018. Bintang Dua kini bertengger di bahunya. Tanggung jawab dan tugas, Irjen. Pol. Drs. Achmat Juri, M.Hum., pun semakin besar.

*13 Juli 2018, Achmat Juri resmi berpangkat Bintang Dua, itu artinya tugas dan tanggung jawabnya mengawal kamtibmas NTB semakin besar.
Foto: menghadap Presiden RI dalam rangka kenaikan pangkat*





*Bersama istri tercinta usai pelantikan kenaikan pangkat
Bintang Dua di Mabes Polri*

Beres mewujudkan kenaikan tipe Polda NTB menjadi tipe A, Achmat Juri melanjutkan tugas menyiapkan pengamanan maksimal untuk Pemiluakada serentak di Nusa Tenggara Barat. Berbagai aktivitas yang menjadi rangkaian pengamanan Pemiluakada pun diikutinya. Operasi-operasi kamtibmas menjelang Pemiluakada , gelar-gelar pasukan hingga simulasi pengamanan Pemiluakada secara massif dilakukannya di seluruh kabupaten kota khususnya yang menggelar Pemiluakada serentak.

Disadarinya, meski NTB yang selama ini masuk dalam zona merah dan kini telah keluar dari zona rawan konflik sosial sejak tahun 2017 tersebut, ia tetap memberi atensi prioritas dalam pengamanan Pemiluakada serentak ini.

Membangun kesadaran masyarakat untuk tetap utuh dalam perbedaan itulah yang membuatnya rajin berkomunikasi dengan semua pihak. Karena baginya, konflik sosial yang disebabkan berbedanya pilihan dalam Pemilu pada dinilainya sebagai langkah mundur pada suatu peradaban.

Komunikasi dan musyawarah yang dikedepankan akan menghindari konflik dan pikiran primitif. Tentu saja jika ada persoalan dalam masyarakat yang bertemu jalan buntu setelah proses mediasi maka, jalur hukum sudah siap bekerja dan Kepolisian akan mengawalinya. Pariwisata menjadi salah satu fokus pengamanan Polda NTB. Pasalnya, sektor wisata sudah menjadi andalan bagi Pemerintah Provinsi NTB. pengamanan objek destinasi wisata tetap berjalan sebagaimana biasanya tanpa ada pengaruh Pemilu. Dengan begitu, wisatawan tidak perlu khawatir untuk tetap berkunjung ke NTB selama pelaksanaan Pemilu



*Pemilukada serentak menjadi salah satu fokus perhatiannya dalam menjaga dan memelihara kamtibmas Bumi Gora.
Foto saat berkunjung ke KPU NTB*



*Memastikan semua proses Pemiluakada berjalan sebagaimana mestinya,
Achmat Juri juga rajin menyambangi Bawaslu NTB*

. kawasan wisata seperti Pantai Senggigi, Gili Trawangan, hingga Pantai Kuta tak luput dari pengawasan Polda NTB. Tak hanya objek wisata yang sudah populer, Polda NTB melakukan pengawasan ke sejumlah objek wisata baru yang relatif sepi dari wisatawan.

Wisatawan, terutama yang dari luar negeri itu senang dengan objek wisata yang masih alami dan di daerah terpencil. Polda NTB rutin melakukan patroli di wilayah-wilayah tersebut, seperti di selatan Pulau Lombok Sukses pengamanan Pemiluakada serentak di Nusa Tenggara Barat, tidak bisa dibilang biasa. Tensi proses menuju hari H pada Pemiluakada serentak di Nusa Tenggara Barat, terus meningkat dari hari ke hari. Persaingan antar calon pasangan dan juga para pendukung begitu terasa. Riak-

Kunjungan sekaligus bersilaturahmi dengan Bawaslu NTB





Bahkan hingga malam ia mengecek kesiapan TPS-TPS menjelang hari H pencoblosan pada Pemilu pada serentak Nusa Tenggara Barat, sekaligus memberi semangat kepada para petugas TPS

riak suhu memanas kerap tampak.

Potensi-potensi konflik tidak jarang muncul ke permukaan, namun semua itu sudah diantisipasi dengan pola pengamanan yang lebih dekat ke masyarakat. Komunikasi yang intensif yang dilakukan Kapolda NTB dan jajarannya, menjadi kunci suksesnya peredaman potensi konflik ini sehingga tidak membunch menjadi konflik yang dapat merugikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan keamanan bagi seluruh aspek roda kehidupan masyarakat NTB. Empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang turun berlaga pada Pemilu pada serentak 2018 ini, bukanlah tokoh-tokoh sembarangan. Mereka masing-masing memiliki pendukung fanatik dan



Memberi arahan kepada anggota/personil Kepolisian yang melakukan PAM Pemilukada menjelang hari H pencoblosan

sama-sama siap untuk memenangkan calonnya.

Empat pasangan yang bertarung itu adalah Ali Bin Dahlan, Bupati Lombok Timur dan TGH L Gde Wiresakti Amir Murni perseorangan, Rektor Universitas Nahdlatul Wathan (NW) yang bertarung lewat jalur perseorangan. Ada pula pasangan Suhaili FT yang merupakan Bupati Lombok Tengah berpasangan dengan Muhammad Amin yang juga adalah Wakil Gubernur NTB. Dua pasangan lainnya adalah Ahyar Abduh yang nota bene adalah Walikota Mataram berpasangan dengan Mori Hanafi, dan Wakil Ketua DPRD NTB. Dan pasangan satu lagi Dr. Zulkieflimansyah Anggota DPR RI dan Dr. Sitti Rohmi Djalilah yang merupakan Rektor Universitas Hamzanwadi yang juga kakak kandung TGH. M. Zainul Majdi. Tentu ke empat pasangan ini, sama-sama memiliki kesempatan yang kuat untuk menang juga memiliki pendukung-pendukung yang militan.

Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,

memang lebih banyak menyedot perhatian publik dibandingkan dengan PemiluKada yang berlangsung di kabupaten dan kota lainnya di NTB. Namun, Kapolda NTB memerintahkan seluruh jajarannya untuk memberikan atensi yang sama kepada seluruh kabupaten kota juga provinsi yang menggelar PemiluKada serentak ini, tanpa kecuali. Ini menjadi salah satu pertarungan bagi Achmat Juri sebagai pimpinan tertinggi di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Dan ini sekaligus menguji kepemimpinannya. Tidak mudah memang. Sampai dengan proses pencoblosan pada PemiluKada serentak di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 27 Juni 2018, semua berlangsung lancar, aman dan damai. PemiluKada di NTB berlangsung meriah, meski ada sedikit peningkatan suhu politik yang menegangkan dan ini sangat wajar terjadi di setiap daerah yang menyelenggarakan PemiluKada.

Tidak ada gesekan berate antar pendukung termasuk

Mengantisipasi gangguan kamtibmas, Achmat Juri berkeliling mengecek pengamanan dan kesiapan TPS menjelang hari H pencoblosan



di sarana-sarana umum yang semula diperkirakan akan terjadi gesekan atau pun pertemuan-pertemuan antarpending, tidak terjadi. Semua berjalan damai dan bahagia. Namun, beberapa waktu hingga beberapa hari selanjutnya usai pencoblosan, suhu politik berangsur-angsur terasa meningkat. Sedikit menegangkan ketika pada hari H Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, setelah diprediksi beda suara yang sangat tipis antar dua pasangan calon, yakni Dr. Zulkifliemansyah-Dr. Sitti Rohmi Djalilah dan Suhaili FT-Muhammad Amin, mulai mengundang banyak komentar.

Saling klaim kemenangan antar pendukung tidak dapat dihindari. Ditambah lagi hasil quick count yang bersileweran yang memperlihatkan sangat sangat tipisnya perbedaan hasil suara yang diperoleh. Menghadapi



Empat pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang berlaga dalam Pemilukada serentak di Nusa Tenggara Barat tahun 2018, yang masing-masing memiliki pendukung fanatik

situasi ini, Kapolda NTB kembali memerintahkan seluruh jajarannya agar waspada dan membaca semua kemungkinan yang akan terjadi dengan terus membangun komunikasi dengan seluruh pihak terkait.

Pendekatan yang soft diterapkan juga kepada para pendukung masing-masing calon. Bagi Achmat Juri, jika terjadi bentrokan, maka bukan hanya antar pendukung yang merasakan akibatnya melainkan juga nama Nusa Tenggara Barat. Sebab itu, pengamanan maksimal terus ditingkatkan. Seluruh tahapan Pemilukada serentak Nusa Tenggara Barat tahun 2018, berlangsung dengan sukses dan aman. Masyarakat NTB menikmati indahnya kedamaian dan kenyamanan berpesta demokrasi, sehingga berbondong-bondong menyalurkan hak pilihnya di bilik suara.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya, merupakan indikasi pasti akan rasa aman dan nyaman dalam mengikuti proses politik ini. Peningkatan partisipasi pemilih ini diungkapkan oleh Ketua KPUD NTB, Lalu Aksar Ansori, selain telah terselenggaranya Pemilukada yang aman dan tertib, ia juga mengungkap data bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilukada NTB 2018 meningkat 75,12 persen dibanding Pilkada 2013 yang hanya mencapai 70,06 persen.

Dan dari 17 provinsi di Indonesia yang menggelar Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur, NTB merupakan yang tertinggi tingkat partisipasi pemilihnya. Selain itu Pemilukada NTB tidak meninggalkan

perselisihan ataupun sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk tidak adanya gugatan di DKPP dan tindak pidana Pemilu.

Pengamanan tidak sampai di sini melainkan hingga tahapan penetapan calon terpilih juga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat secara resmi menetapkan Zulkieflimansyah dan Siti Rohmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih hasil Pemilukada 27 Juni 2018. Penetapan Paslon nomor urut tiga ini sukses dilaksanakan tanpa sebelumnya ada gugatan dari Paslon lainnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sampai pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub NTB 2018, yang digelar oleh KPUD NTB berjalan lancar dan aman pada tanggal 8 Juli 2018. Seluruh rangkaian pengamanan Pemilukada NTB tahun 2018, berlangsung sukses. (Keamanan ini juga dirasakan masyarakat NTB sampai Dr. H. Zulkieflimansyah-Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, secara resmi dilantik oleh Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 19 September 2018).

Begitu juga dengan proses Polda NTB naik tipe dari tipe B menjadi tipe A. Dua agenda penting itu telah berjalan lancar, termasuk pengamanan di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Achmat Juri bernafas lega sembari merancang rencana-rencana besar yang sudah disiapkannya dalam pengabdianya di Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi, belum lagi semua rencana itu dilaksanakannya,

Nusa Tenggara Barat tiba-tiba dilanda gempa bumi besar yang sempat membuat situasi benar-benar menyulitkan semua pihak.

Tiga gempa yang sangat kuat itu terjadi pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 06.47 Wita, bermagnitudo 6,4 SR, lalu guncangan kedua lebih besar lagi yakni bermagnitudo 7.0 SR mengguncang Pulau Lombok berpusat di Lombok

*Sebelum semua rencana dalam membangun kamtibmas di NTB berhasil dilaksanakan, Lombok Sumbawa diguncang gempa dahsyat yang meluluhlantakkan wilayah-wilayah yang menjadi pusat gempa.
Foto: situasi pasca gempa bumi di Lombok Utara*





Di masa guncangan gempa yang terus menerus, Achmat Juri tidak hanya melaksanakan tugas pokoknya, melainkan memerintahkan seluruh jajarannya untuk turun langsung membantu dan menyelamatkan korban-korban gempa sesegera mungkin. Foto: meninjau lokasi gempa bersama Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, di Lombok Utara

Utara pada tanggal 5 Agustus 2018 dan guncangan besar lainnya menyusul di tanggal 19 Agustus 2018, dengan kekuatan 5,2 SR berpusat di Sumbawa bagian barat.

Tiga gempa besar mengguncang Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa bagian barat, membuat seluruh peta perhatian tertuju pada penanganan korban dan *recovery* juga

Mengecek lokasi pengungsian korban gempa bumi di Lombok Utara. (Bawah) memberi bantuan korban gempa di lokasi pengungsian di Lombok Utara





Foto atas bawah: Kapolda NTB menjenguk dan memberi bantuan kepada korban gempa bumi Lombok Utara

rekonstruksi secara menyeluruh. Dalam masa NTB dilanda bencana seperti ini, Achmat Juri memberikan perhatian sepenuhnya kepada masyarakat terutama yang menjadi korban. Tidak tanggung-tanggung, ia memerintahkan seluruh jajaran dan anggota Kepolisian Daerah NTB, seluruhnya bergerak dan turun ke lapangan membantu dan menyelamatkan korban bencana gempa ini, meski banyak pula anggota kepolisian yang juga turut menjadi korban.

Seluruh kemampuan Polda NTB dikerahkannya untuk terlibat langsung dalam penyelamatan korban.





Koordinasi lapangan bersama seluruh PJU Polda NTB kerap dilakukan untuk tindakan cepat dalam menolong masyarakat yang menjadi korban

Perhatiannya yang sangat besar terhadap korban dan situasi menyedihkan yang terlihat di seluruh wilayah terdampak gempa, membuatnya 'lupa' jika tugas pokoknya itu hanya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan menjaga kamtibmas. Dalam masa bencana yang terjadi secara terus menerus selama lebih kurang hingga dua bulan ini, Achmat Juri tidak hanya melaksanakan tugas-tugas pokoknya itu melainkan jauh melampaui tugas-tugas Kepolisian. Sepanjang proses penanganan khususnya pada masa genting gempa massif terjadi ini, ia setiap hari melakukan operasi kemanusiaan demi menyelamatkan para korban. Kisah-kisah heroik Polisi di lapangan juga menjadi bagian penting yang tidak bisa dilupakan dari perintah-

Achmat Juri
JEJAK LANGKAH
DI PENGGALAN WAKTU



Polisi bekerja tiada henti menolong warga korban gempa, meski diri dan keluarganya sendiri juga menjadi korban gempa bumi ini



Langkah-langkah cepat Kapolda NTB dalam menyelamatkan warga termasuk warga asing, menyelamatkan nama baik NTB. Foto: (atas) saat kunjungan Kapolri ke lokasi pengungsian. (Bawah) Memberi keterangan pers dan mengecek kondisi salah satu Polsek yang rusak oleh gempa

perintahnya kepada seluruh jajaran dan anggota Kepolisian Daerah NTB untuk membantu dan menyelamatkan seluruh korban, sampai tidak ada lagi yang membutuhkan. Tidak hanya itu, langkah-langkah cepat yang diambilnya di lapangan, telah menyelamatkan nama baik Bangsa Indonesia dan juga nama baik Nusa Tenggara Barat, ketika ia melakukan penyelamatan kepada warga negara asing, segera sesaat setelah gempa-gempa terjadi.

